

Mengintegrasikan Gender dalam Aksi Iklim: Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan





Taklimat (Berita Iklim Singkat)

Edisi Gender #01

Mengintegrasikan Gender dalam Aksi Iklim: Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan

Tim Penyusun

Tania Benita, Ratnasari, Seruni Fauzia Lestari, Ni Putu Trisnaning Laksemi,
Ira Ratna Sari, Era Irhamni, Feri Johana

Sitasi

Benita T, Ratnasari, Lestari SF, Laksemi NPT, Sari IR, Irhamni E, Johana F. 2024. *Taklimat Edisi Gender #01 - Mengintegrasikan Gender dalam Aksi Iklim: Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan*. Bogor, Indonesia: World Agroforestry (ICRAF).

Ketentuan dan Hak Cipta

World Agroforestry (ICRAF) memegang hak cipta atas publikasi dan halaman webnya, namun memperbanyak untuk tujuan non-komersial dengan tanpa mengubah isi yang terkandung di dalamnya diperbolehkan. Pencantuman referensi diharuskan untuk semua pengutipan dan perbanyak tulisan dari buku ini. Pengutipan informasi yang menjadi hak cipta pihak lain tersebut harus dicantumkan sesuai ketentuan. Link situs yang ICRAF sediakan memiliki kebijakan tertentu yang harus dihormati. ICRAF menjaga database pengguna meskipun informasi ini tidak disebarluaskan dan hanya digunakan untuk mengukur kegunaan informasi tersebut. Informasi yang diberikan ICRAF, sepengetahuan kami akurat, namun kami tidak memberikan jaminan dan tidak bertanggung jawab apabila timbul kerugian akibat penggunaan informasi tersebut. Tanpa pembatasan, silakan menambah link ke situs kami www.cifor-icraf.org pada situs anda atau publikasi.

World Agroforestry (ICRAF)

Program Indonesia

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang
Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416
Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

Tata Letak: Riky M Hilmansyah

2024



© World Agroforestry (ICRAF)

Pendahuluan

Kebijakan yang mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi di Indonesia saat ini telah berusaha memastikan pendekatan yang responsif gender. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Namun, indikator-indikator tersebut ada batasnya. Mereka tidak dapat menggambarkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa aspek pembangunan, **salah satunya kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.**

Demi mewujudkan **masa depan yang setara**, perempuan dan laki-laki perlu terlibat, didengarkan aspirasinya, dan memiliki akses yang berkeadilan terhadap manfaat pembangunan.

Bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam aksi menghadapi perubahan iklim?

Latar Belakang

Apa itu Pengarusutamaan Gender?

- Menurut Council of Europe (1998), pengarusutamaan gender adalah proses (re) organisasi, perbaikan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender di semua tingkatan dan tahapan.
- Proses ini dilakukan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan.

Apa kaitan gender dan perubahan iklim?

Pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam penanganan perubahan iklim. UNFCCC Conference of the Parties 27 di Egypt tahun 2022 menegaskan hubungan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim. Diperlukan aksi perubahan iklim yang konkret dengan melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam pengambilan keputusan. COP27 menghasilkan kesepakatan untuk memperbaharui dan memperkuat *Gender Action Plan (GAP)*.

Apa landasan hukum pengarusutamaan gender di Indonesia?

- Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
- Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menegaskan bahwa penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan harus responsif gender serta menginstruksikan semua perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda untuk mengintegrasikan PUG dalam perencanaan dan penganggaran daerah setiap tahun
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Provinsi Sumatera Selatan
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi Sumatera Selatan

Apa pentingnya mengarusutamakan gender dan perubahan iklim dalam perencanaan daerah?

- Menyusun perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis gender di Indonesia amatlah penting **untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan, serta menangani perubahan iklim secara efektif.**
- Dalam konteks rencana pembangunan, **analisis berbasis gender membantu kita untuk melihat isu kesetaraan gender melampaui tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 5.**
- Dengan kondisi lingkungan hidup yang berubah, **perempuan akan menerima dampak yang berbeda dari pembangunan dan perubahan iklim dibandingkan laki-laki.**



Tren Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun fluktuatif. Namun, **pada tahun 2021 sebesar 92,35%** berada di atas Capaian Nasional yaitu 91,27%.

Keterlibatan **perempuan di parlemen mencapai 21,62%** di tahun 2020.

90% pekerjaan rumah tangga dikerjakan oleh perempuan.

Faktor pemungkin



Kepemimpinan yang mendorong pada kebijakan yang transformatif gender



Hadirnya pemangku kepentingan yang tepat (*policy entrepreneurs*)



Adanya visi dan persoalan yang perlu dipecahkan bersama

Tantangan



Kurangnya target spesifik kebijakan



Ruang inovasi kebijakan yang sempit



Perbedaan persepsi dan penerimaan tentang gender dan perubahan iklim



Terbatasnya ketersediaan data terpilah



Tren Global

Pada tahun 2030, 150 juta perempuan dan anak-anak perempuan akan berada dalam kemiskinan.

Kerawanan pangan perempuan 10% lebih besar dibandingkan laki-laki pada tahun 2020, lebih besar dibandingkan 2019 sebesar 6%.

Terjadi akibat tekanan pandemi Covid-19.

Sumatera Selatan

Persentase penduduk miskin Sumatera Selatan yaitu 12,66%, dengan perempuan terdampak sebagai pemegang peran di rumah tangga. Kondisi kemiskinan semakin parah pada area dengan kondisi lingkungan yang terdegradasi, misalnya lahan gambut.

Perubahan ekosistem dan pola produksi dapat menyebabkan kelangkaan pangan bagi laki-laki maupun perempuan. Namun, perempuan berisiko terdampak lebih parah.

Sumatera Selatan melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menargetkan 1 desa per 1 kecamatan dengan total target 240 desa di tahun 2025.



Perempuan berisiko kehilangan pekerjaannya apabila dihadapkan dengan tekanan seperti pandemi.

Data global menunjukkan 54 juta perempuan kehilangan pekerjaan saat pandemi.

- 69,23% perempuan berada dalam usia yang produktif.
- Sebagian besar perempuan bekerja di dua sektor: informal dan pertanian. Sektor berbasis lahan terdampak oleh perubahan kondisi lingkungan.
- Tren perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi dan teknisi meningkat pada tahun 2021 sebesar 54,37%.



Perubahan iklim akan memberikan dampak pada laki-laki maupun perempuan.

Bencana iklim akan memberikan dampak lebih dalam terhadap perempuan karena status sosial-ekonominya.

Bencana iklim (climate-induced disaster) sudah mulai terjadi dengan banjir, kekeringan, kebakaran. Situasi ini membuat perempuan harus mengambil peran mencari tambahan nafkah dengan beban mengelola rumah tangga. Studi yang dilakukan ICRAF di desa-desa gambut juga menunjukkan perempuan mengambil peran kepemimpinan karena adanya migrasi keluar oleh laki-laki yang mencari nafkah.

Contoh Pemetaan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat pada Isu Perubahan Iklim di Sumatera Selatan

Pemetaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kelompok-kelompok masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya, memiliki **akses terhadap sumber daya, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kontrol atas sumber daya, dan mendapatkan manfaat dari berbagai program dan kebijakan.**



© World Agroforestry (ICRAF)

Isu Mitigasi dan Adaptasi

Akses

- Bantuan untuk kebutuhan perempuan dan anak serta disabilitas tidak terpilah dan tidak menjadi prioritas
- Sosialisasi pencegahan karhutla masih ditujukan oleh kelompok laki-laki

Partisipasi

- Partisipasi perempuan dalam perencanaan, pengendalian, dan penanggulangan banjir dan kekeringan relatif rendah
- Anggota satgas dan MPA masih didominasi oleh laki-laki sebesar 90%
- Desa tangguh bencana melibatkan perempuan sebesar 25%
- Partisipasi perempuan terbatas pada urusan logistik dan konsumsi

Kontrol

- Pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana masih didominasi oleh laki-laki
- Penganggaran belum dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan

Manfaat

- Anak-anak terdampak paling parah terhadap kejadian bencana alam seperti karhutla, terutama akibat ISPA

Isu Kerawanan dan Kelangkaan Pangan

Akses

- Akses pengetahuan dan informasi masih terbatas khususnya pada perempuan misalnya dalam budidaya tanaman dan pemanfaatan teknologi pengelolaan pangan
- Kurangnya informasi dan data pendukung mengenai kelompok rentan seperti data KKP, disabilitas, dan ibu muda
- Akses dalam mendapatkan program pendanaan yang masih terbatas

Partisipasi

- Partisipasi dalam Kelompok Wanita Tani belum menjangkau kelompok rentan seperti kelompok disabilitas
- Partisipasi dalam penyampaian pendapat masih rendah

Kontrol

- Pengambilan keputusan dalam forum musyawarah/ kelompok desa masih didominasi oleh laki-laki

Manfaat

- Manfaat program belum menyentuh aspek keberlanjutan



© World Agroforestry (ICRAF)

Metode dan pendekatan

Integrasi gender dalam kebijakan, dilihat melalui setiap tahapan yaitu:

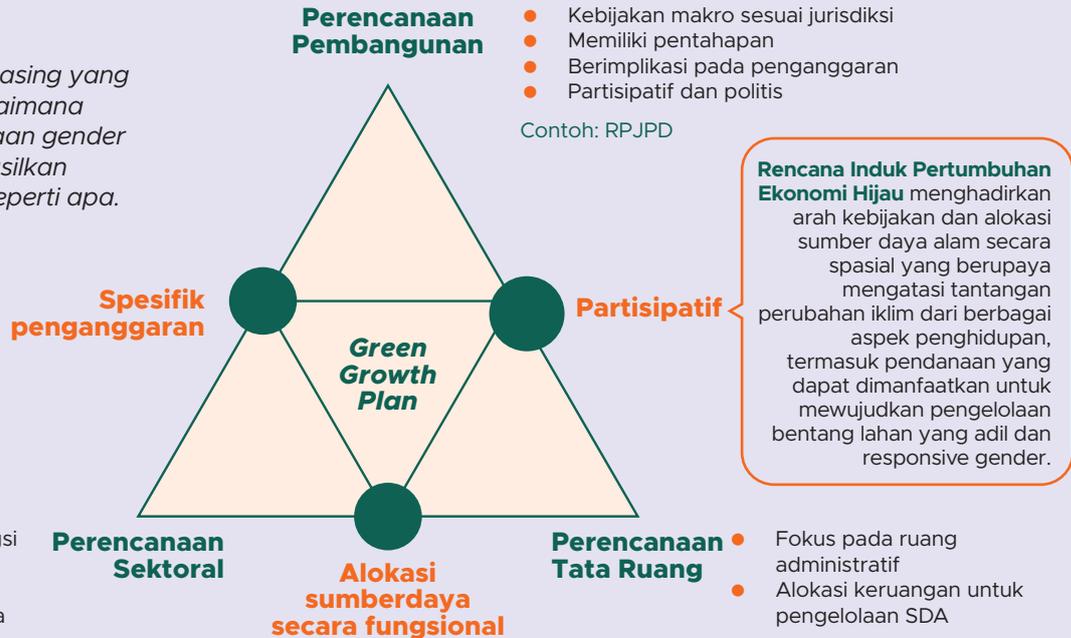


Contoh kategori tingkat regulasi:

Kerangka Penilaian Regulasi	Buta Gender	Netral Gender	Sensitif/Responsif Gender	Transformatif Gender
	Analisis Gender	Tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan	Tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan	Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan
Penilaian Tingkat Regulasi	Mengabaikan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial	Mengabaikan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial	Mempertimbangkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial	Mempertimbangkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial
	Cenderung mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya	Berpotensi mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya	Berupaya mengurangi kesenjangan gender	Menyasar akar persoalan terjadinya ketidakadilan gender

Tipologi Dokumen Perencanaan Daerah dan Implikasinya pada Pengarusutamaan Gender

Setiap jenis dokumen perencanaan memiliki karakteristik masing-masing yang berimplikasi pada bagaimana proses pengarusutamaan gender dilakukan dan menghasilkan output perencanaan seperti apa.



Seperti apa kesenjangan pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan?

Pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan merupakan bentuk ideal yang diinginkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Namun, jika dilihat dari spektrum perencanaan, mulai dari yang partisipatif seperti rencana pembangunan hingga rencana teknis, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam pengarusutamaan gender. Di Sumatera Selatan, kesenjangan ini semakin besar ketika proses perencanaan cenderung lebih teknis. Pada tahap perencanaan teknis, penting adanya data terpilah gender untuk mendorong analisis yang lebih mendalam dan relevan dengan isu-isu gender.

Bentuk ideal pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan daerah	Perencanaan Pembangunan (RPJPD, RPJMD)	Perencanaan Sektoral (RAD KSB, RAD API, RAD PG)
Penggunaan data terpilah gender dalam analisis kondisi daerah	Data terpilah gender tersedia sebagian untuk indikator yang didorong secara nasional	Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap
Penggunaan analisis gender dan inklusi sosial dalam penentuan isu strategis	Analisis gender dan inklusi sosial dalam penetapan isu strategis daerah dengan tim penyusun	
Analisis <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> untuk program prioritas pembangunan	Analisis GAP dan GBS sudah dilakukan	
Analisis kerentanan perempuan, laki-laki, maupun disabilitas terhadap isu yang diangkat	Analisis kerentanan dilakukan melalui GAP	Analisis kerentanan yang responsif gender sedang disusun
Penetapan indikator kinerja berbasis gender dan inklusi sosial	Indikator indeks pembangunan gender (IPG) dan pemberdayaan gender (IDG) sudah masuk dalam rencana	Dalam RAD KSB terdapat indikator terkait pelibatan dan pemberdayaan perempuan
Representasi kelompok rentan dalam forum	Pelibatan organisasi perempuan dan organisasi masyarakat sipil dalam diskusi	



© World Agroforestry (ICRAF)

Bentuk ideal pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan daerah	Perencanaan Tata Ruang (RTRWP)	Perencanaan Sektoral (Rencana Strategis)
Penggunaan data terpilah gender dalam analisis kondisi daerah	Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap	Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap, hanya tersedia untuk sektor tertentu seperti Kesehatan.
Penggunaan analisis gender dan inklusi sosial dalam penentuan isu strategis		Perspektif gender digunakan pada sektor tertentu tidak diterapkan di semua sektor.
Analisis <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> untuk program prioritas pembangunan		Belum semua rencana strategis dilengkapi GAP dan GBS, hanya beberapa program/kegiatan yang dilengkapi GAP.
Analisis kerentanan perempuan, laki-laki, maupun disabilitas terhadap isu yang diangkat	Pemetaan program ruang yang berbasis gender sudah diinisiasi	
Penetapan indikator kinerja berbasis gender dan inklusi sosial		<i>(Hanya di sektor tertentu seperti pemberdayaan perempuan)</i>
Representasi kelompok rentan dalam forum		

Bagaimana menerjemahkan isu perubahan iklim ke dalam perencanaan?

Identifikasi isu awal berbasis gender merupakan langkah krusial dalam merumuskan pendekatan yang efektif dan tepat guna dalam konteks pengarusutamaan gender. Dengan memahami isu-isu gender yang melatarbelakangi setiap permasalahan pembangunan, kita dapat merancang solusi yang mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif perempuan dan laki-laki secara setara.

Isu	Bentuk penerjemahan isu perubahan iklim dalam dokumen perencanaan		
	Perencanaan Pembangunan	Tata Ruang	Perencanaan sectoral/tematik
Kerawanan pangan dan kelangkaan bahan pangan Meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan	<ul style="list-style-type: none"> Telaah data terpilah produksi, akses, dan pemanfaatan pangan Penahapan arah kebijakan yang spesifik (lokasi) dan indikasi pendanaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan strategi, zonasi dan pengaturan pengendalian luas lahan sawah berkelanjutan/ yang dilindungi Memastikan konektivitas antar pusat pertumbuhan Pengembangan pertanian pangan mengacu pada kesesuaian lahan dan kearifan lokal masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis secara fungsi ekosistem (hulu-hilir) Pengembangan skenario dan alternatif arah kebijakan kerawanan pangan berbasis spasial Identifikasi pemangku kepentingan dan indikasi pendanaan

Isu	Bentuk penerjemahan isu perubahan iklim dalam dokumen perencanaan		
	Perencanaan Pembangunan	Tata Ruang	Perencanaan sectoral/tematik
<p>Kemarau panjang dan banjir</p> <p>Adanya beberapa daerah yang lebih rawan banjir dan kekeringan, namun intervensinya belum responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisis penyebab dan skenario dampak kemarau panjang dan banjir (terpilah) ● Penahapan arah kebijakan yang spesifik (lokasi) dan indikasi pendanaannya ● Pengembangan program jaring pengaman untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap dampak kemarau panjang dan banjir 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan strategi, zonasi dan pengaturan pengendalian pemanfaatan DAS, lahan kritis, dan lahan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peta intervensi rehabilitasi lahan kritis, DAS ● Identifikasi kelompok penerima manfaat dan kelembagaan secara targeted, mengidentifikasi pembagian peran secara adil ● Mitigasi risiko dan rencana kontingensi bencana kemarau panjang dan banjir yang spesifik terhadap kelompok penerima manfaat yang berbeda
<p>Kebakaran hutan dan lahan</p> <p>Anak-anak terdampak paling parah terhadap kejadian kebakaran hutan dan lahan, terutama akibat ISPA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Analisis penyebab dan skenario dampak karhutla (terpilah) ● Penahapan arah kebijakan yang spesifik (lokasi) dan indikasi pendanaannya ● Integrasi program dan kegiatan pengelolaan hutan dan lahan gambut ● Program penyediaan pelayanan umum mempertimbangkan daerah rawan karhutla 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan strategi, zonasi dan pengaturan pengendalian pemanfaatan pada lahan gambut dan hutan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peta intervensi rehabilitasi lahan gambut dan hutan ● Identifikasi kelompok penerima manfaat dan kelembagaan secara targeted, mengidentifikasi pembagian peran secara adil



Bagaimana mengarusutamakan gender dalam proses perencanaan? Pelajaran dari ...

	Perencanaan Pembangunan RPJPD	Perencanaan Tata Ruang RTRWP	Perencanaan Sektor/Tematik KLHS
Proses dan output kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Tim perencana dan ahli melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proporsi yang berimbang Melibatkan pemangku kepentingan yang beragam dari berbagai sektor dan tingkat pemerintahan Melibatkan konsultasi dengan berbagai kelompok masyarakat yang intensif 	<ul style="list-style-type: none"> Tim perencana dan ahli yang terlibat umumnya didominasi oleh laki-laki Melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dengan tingkat perencanaan tata ruang yang beragam Terdapat proses diskusi yang intensif dengan perwakilan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Tim perencana yang solid dengan melibatkan dan partisipasi perempuan dan laki-laki yang bermakna dengan koordinasi kuat Tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pentingnya penyusunan kebijakan yang inklusif melalui proses konsultasi publik Rekomendasi kebijakan didasarkan pada data dan analisis berbasis bukti dan kajian ilmiah, serta spesifik lokasi

	Perencanaan Pembangunan RPJPD	Perencanaan Tata Ruang RTRWP	Perencanaan Sektoral/Tematik KLHS
Substansi	<ul style="list-style-type: none"> Strategi dan arah kebijakan mengarahkan pada peningkatan akses masyarakat pada modal-modal penghidupan agar dapat mandiri, resilien dan sejahtera RPJPD berorientasi pada pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi penggunaan lahan untuk pembangunan di masa yang akan datang melalui perencanaan struktur dan pola ruang, indikatif arahan zonasi, dan penyediaan lahan untuk penggunaan tertentu. Berorientasi pada penggunaan lahan berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat 	<p>Jaring pengaman lingkungan untuk kebijakan perencanaan ruang dan Pembangunan di masa yang akan datang mencakup aspek 1) perubahan iklim, 2) perubahan guna lahan, 3) pengelolaan air berkelanjutan, 4) polusi udara, 5) pengelolaan wilayah pesisir, 6) keanekaragaman hayati</p>
Tantangan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan proses koordinasi yang panjang antar sektor dan tingkat pemerintahan yang berbeda Kebijakan perencanaan pembangunan bersifat umum dan jangka panjang 	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan proses koordinasi yang panjang antar sektor dan tingkat pemerintahan yang berbeda Kebijakan pengaturan ruang bersifat luas dan umum 	<ul style="list-style-type: none"> Melibatkan proses koordinasi yang panjang antar sektor dan tingkat pemerintahan yang berbeda Keterbatasan data terpilah dan kebijakan yang ditargetkan
Tantangan umum	<ol style="list-style-type: none"> Komposisi tim ahli dan perencana yang beragam dalam tiap tipe kebijakan memerlukan koordinasi yang kuat. Terdapat perbedaan pemahaman terkait gender dan perubahan iklim dalam tim perencana dan pemangku kepentingan terkait. Keluaran kebijakan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan lahan berkelanjutan namun menemui tantangan mobilisasi sumber daya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Terdapat kemajuan dalam peningkatan sensitivitas terhadap isu gender dalam perubahan iklim namun terdapat keterbatasan dalam penyediaan data terpilih gender dan cascading arahan kebijakan dan intervensi menuju transformasi gender Penyusunan kebijakan mewajibkan diskusi internal maupun keterlibatan publik, namun prosesnya masih kaku, kompleks, dan membatasi ruang inovasi. 		



Mengawal program menjadi aksi: “Bagaimana perempuan dan petani memaknai pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lahan berkelanjutan”

"Peran Perempuan dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Pembukaan Lahan Pertanian Tanpa Bakar di Desa Daya Murni, Banyuwasin"

- Desa Daya Murni yang tergabung dalam SL 16B dalam wilayah kecamatan Muara Sugihan ini merupakan wilayah yang bergambut dan sering terjadi peristiwa kebakaran yang antara lain diakibatkan oleh pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar.
- Untuk mencegah terjadinya peristiwa kebakaran lebih lanjut, ICRAF bekerja sama dengan Pemkab setempat melakukan pelatihan tatacara

pembukaan lahan tanpa bakar yang juga melibatkan perempuan. Dari total 20 perwakilan peserta dari desa Daya Murni, ada sebanyak 8 perempuan yang ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pelatihan.

- Pendampingan dari ICRAF lebih lanjut dari pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar akan dilakukan praktik secara langsung di lahan petani untuk memperkuat upaya pengurangan pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian.



© World Agroforestry (ICRAF)

"Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lahan Pertanian secara Agroforestri dalam upaya Mitigasi Perubahan Iklim di Desa Muara Merang, Musi Banyuasin"

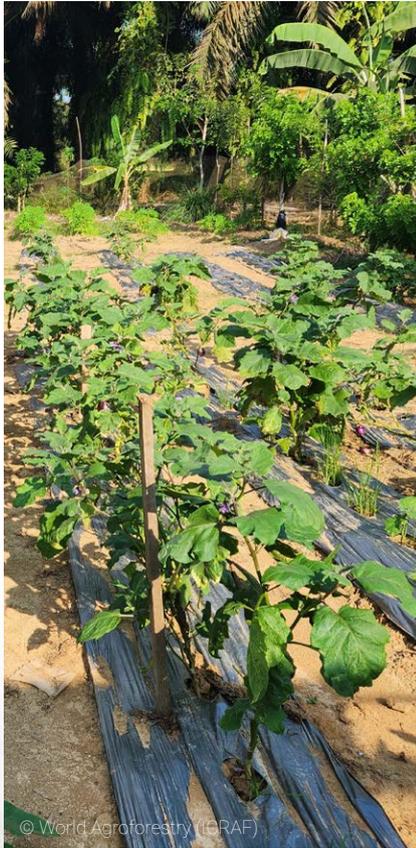
- Di Desa Muara Medak, kejadian luar biasa akibat perubahan iklim yang paling banyak dirasakan adalah kebakaran lahan dan hutan, kekeringan dan kemarau panjang serta banjir bandang. Sebanyak 32,4% rumah tangga di Desa Muara Medak, masih menggunakan jadwal tanam yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai acuan dalam memulai penanaman sehingga berdampak pada tidak optimalnya produktivitas tanaman. Selain itu juga, saat terjadi musim hujan, beberapa kebun akan tergenang karena tidak memiliki sistem drainase sama sekali (64,7%).
- Untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi perubahan iklim tersebut maka Kelompok Belajar Sumber Rezeki yang beranggotakan secara aktif 24 orang dengan perempuan sebanyak 22 orang dan laki-laki sebanyak 2 orang difasilitasi oleh ICRAF melalui Training CSA (*Climate Smart Agriculture*) dengan melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembuatan pupuk organik, pemilihan jenis tanaman dan pembibitan yang unggul, pengenalan dan pengaturan kalender musim dan kalender tanam ketika ada perubahan iklim ekstrem, dan pengenalan pola tanam agroforestri sebagai praktik pertanian cerdas iklim.
- Melalui pendampingan yang dilakukan oleh ICRAF, saat ini anggota kelompok Sumber Rezeki yang berjumlah 24 orang tersebut sudah mampu memperbanyak bibit melalui metode perbanyak vegetatif (sambung pucuk).



© World Agroforestry (ICRAF)



© World Agroforestry (ICRAF)



"Pembangunan Kebun Dapur oleh Kelompok Tani Wanita (KWT) Srikandi dalam mengatasi Kerawanan Pangan dan Gizi di Desa Ganesha Mukti, Banyuasin"

- Dari 29 Responden sebanyak 41% diantaranya mengalami kasus gizi obesitas dan *overweight*. Sebanyak 55.2% mengalami anemia dengan pola konsumsi yang dilakukan 100% mengonsumsi serelia dan umbi-umbian dan 82.76% mengonsumsi kelompok pangan daging, jeroan dan ikan.
- Untuk mencegah obesitas dan anemia diperlukan perubahan pola konsumsi dengan memperbanyak asupan dari kelompok pangan kacang dan polong, kacang dan biji, sayuran hijau, buah dan sayuran tinggi vitamin A.
- ICRAF bersama dengan KWT Srikandi membangun kebun dapur secara komunal dan menanam varietas pangan dengan memperhatikan kebermanfaatan tanaman tersebut bagi keluarga anggota KWT. Selain itu juga, ICRAF mendampingi KWT dalam pengelolaan tanaman pangan seperti penyediaan dan perbanyakan bibit tanaman, penanganan hama dan penyakit tanaman dan juga pemberian pupuk organik pada tanaman.
- Saat ini Kebun Dapur yang dikelola oleh KWT sudah dilakukan pemanenan dan hasil kebun tersebut dibagikan kepada anggota KWT dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.

Mengawal program menjadi aksi: “Bagaimana perempuan dan petani memaknai pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lahan berkelanjutan”

Tantangan Implementasi di Tapak

- Domestifikasi kegiatan dan pelabelan (*stereotyping*) peran berbasis gender, misalnya kegiatan terkait pangan dan gizi diikuti sebagian besar oleh perempuan karena dianggap pemenuhan pangan dan gizi keluarga menjadi ranahnya perempuan, begitu pun sebaliknya untuk kegiatan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) diikuti sebagian besar oleh laki-laki karena dianggap pekerjaan itu menjadi ranahnya laki-laki.
- Minimnya dukungan dari berbagai pihak, dimulai dari lingkup rumah tangga, komunitas, desa, maupun tingkat yang lebih luas dalam upaya memperkuat kapasitas perempuan dan kelompok rentan untuk pengelolaan lahan berkelanjutan.
- Minimnya suara dan aspirasi perempuan serta kelompok rentan dalam forum pengambilan keputusan, seperti dalam organisasi rakyat maupun forum formal lainnya sehingga kepentingan dan kebutuhannya belum tertangkap.



© World Agroforestry (ICRAF)



© World Agroforestry (ICRAF)

Sekolah Perempuan

- Sekolah perempuan menjadi media bagi penguatan kapasitas dan kepercayaan diri perempuan menjadi agen perubahan dalam masyarakat.
- Piloting Sekolah Perempuan di Neke - Nusa Tenggara Timur melalui Land4Lives projek oleh ICRAF Indonesia, memberi contoh nyata upaya pemberdayaan di tapak untuk membangun relasi yang lebih setara dan saling mendukung dalam keluarga sehingga mampu mengurai persoalan ketidakadilan gender dalam masyarakat untuk mendorong pengelolaan lahan berkelanjutan.
- Laki-laki diberikan ruang melalui kelas laki-laki dalam Sekolah Perempuan agar laki-laki memiliki pemahaman yang sama tentang isu gender.
- Model Sekolah Perempuan dapat direplikasi dan dikembangkan di berbagai daerah termasuk Sumsel, menggunakan pendekatan partisipatif dan sesuai konteks lokal.



Simpulan dan rekomendasi

- Integrasi aspek gender dalam perencanaan sangat krusial, terutama dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Integrasi ini harus dilakukan mulai dari tahap desain hingga implementasi, dan diterjemahkan menjadi perencanaan strategis dan panduan operasional yang responsif gender.
- Kebijakan perencanaan daerah bervariasi mulai dari perencanaan Pembangunan (seperti RPJPD, RPJMD), perencanaan tata ruang (RTRW), serta perencanaan sektoral/tematik (seperti KLHS, RAD KSB, RPPEG). Ketiga tipologi kebijakan perencanaan ini memiliki karakteristik yang berbeda terkait tingkat partisipasi para pihak dalam proses perencanaan, alokasi sumber daya secara fungsional, dan implikasi terhadap anggaran daerah. Mengacu pada perbedaan karakteristik tersebut, pendekatan pengarusutamaan gender perlu dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan berbagai proses perencanaan.
- Pengarusutamaan gender dalam berbagai dokumen perencanaan mencakup 1) penggunaan data terpilah gender, 2) penggunaan analisis gender dalam perumusan isu, 3) analisis GAP an GBS untuk program prioritas, 4) analisis kerentanan perempuan dan laki-laki terhadap isu yang diangkat, 5) penetapan indikator kinerja responsif gender, 6) representasi kelompok rentan dalam proses.
- Program dan kebijakan responsif gender perlu diterjemahkan di tingkat tapak. Beberapa inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pengelolaan lahan melalui Land4Lives antara lain Sekolah Perempuan, pengelolaan kebun dapur untuk ketahanan pangan rumah tangga, peningkatan pemahaman kelompok wanita tani dalam upaya pembukaan lahan tanpa bakar dan pertanian cerdas iklim.



#LahanUntukKehidupan
www.lahanuntukkehidupan.id

Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods (Land4Lives) in Indonesia atau #lahanuntukkehidupan adalah proyek lima tahun yang didanai oleh Global Affairs Canada, untuk tata kelola bentang lahan yang lebih baik, ketahanan pangan, kesetaraan gender dan perubahan iklim. Pelaksanaan proyek yang mencakup Provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia.

World Agroforestry (ICRAF) Indonesia Program

Jl. CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang | Bogor 16115 [PO Box 161 Bogor 16001] Indonesia
Tel: +(62) 251 8625 415 ; Fax: +(62) 251 8625416 | Email: icraf-indonesia@cifor-icraf.org
www.cifor-icraf.org/locations/asia/indonesia

